RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MERGANGSAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN MERGANGSAN

KOTA YOGYAKARTA

2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN
Jalan Sisingamangaraja No. 55 Telp. 388943 Yogyakarta 55153
Email: mg@jogjakota.go.id Email Intranet: mg@intra.jogjakota.go.id
Hotline SMS: 0812278001 Hotline Email upik@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Kepada
Yth. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Yogyakarta
Di –
Yogyakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor: 130/ 313

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rencana Kerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2019	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat menjadikan periksa

CAMAT MERGANGSAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN MERGANGSAN

Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI
NIP 196702061994032007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema: ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".***

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 berlandaskan pada beberapa perundangan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
b. Merupakan suatu pedoman kinerja instansi agar dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mergangsan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mergangsan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mergangsan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mergangsan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergagsan Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mergangsan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Mergangsan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu dan realisasi Renstra Kecamatan Mergangsan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Mergangsan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Mergangsan.

2.1.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mergangsan pada tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Mergangsan. Indikator kinerja berupa meningkatnya “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan” pada tahun 2017 ditargetkan 340 sedangkan dilihat dari hasil pengelolaan Tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se Kecamatan Mergangsan 381 atau dengan capaian 112%.

Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Mergangsan untuk tahun 2017 dapat mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal SKPD
   a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan
      Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

   b. Kerjasama antar unit
      Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas ddan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan

jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Mergangsan dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) disajikan tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

NAMA SKPD: KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Tahun 2022)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun yang Lalu (2015)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Target Capaian Realisasi Target Renstra
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+13)	15=(14/5)
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**517,455,612**	**100%**	**475,594,217**	**100%**	**91.91%**	**100%**	**100%**	
1.1	Penyediaan rapat-rapat koordinsi dan konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk:				79,248,500		62,419,753		78.76%			
		a. Koordinasi	420 kali	60 kali	69 kali		69 kali		100.0%		70 kali	139 kali	33%

		b. Pegawai	52	orang	53	orang	52	orang		42	orang		80.8%		52	orang	52	orang	100%
		c. Tamu	12	kali	2	kali	2	kali		2	kali		100.0%		2	kali	4	kali	33%
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor								307,246,100			282,380,420		91.91%					
		Meterai 6.000	720	buah	120	buah	152	buah		152	buah		100.0%		120	buah	272	buah	38%
		Meterai 3.000	2220	buah	370	buah	435	buah		435	buah		100.0%		370	buah	805	buah	36%
		Jasa pembayaran rek listrik	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa pembayaran rek air	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa pembayaran rek telpon	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25	jenis			5	jenis		5	jenis		100.0%		5	jenis	10	jenis	40%
		Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6	kali			1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		STNK roda 4 yang terbayar	1	unit	1	unit	1	unit		1	unit		100.0%		1	unit	1	unit	100%
		STNK roda 3 yang terbayar	2	unit	2	unit	2	unit		2	unit		100.0%		2	unit	2	unit	100%
		STNK roda 2 yang terbayar	13	unit	13	unit	13	unit		13	unit		100.0%		13	unit	13	unit	100%
		Bahan dan Alat kebersihan tersedia	15	jenis			3	jenis		3	jenis		100.0%		3	jenis	6	jenis	40%
		Jasa kebersihan kantor	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa perbaikan peralatan kerja	11	jenis			11	jenis		11	jenis		100.0%		11	jenis	11	jenis	100%

		Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer	3	jenis			3	jenis		3	jenis		100.0%		3	jenis	3	jenis	100%
		Alat tulis kantor yang tersedia	47	jenis	47	jenis	47	jenis		47	jenis		100.0%		47	jenis	47	jenis	100%
		Jasa pencetakan	2	jenis			1	jenis		1	jenis		100.0%		1	jenis	2	jenis	100%
		Jasa penggandaan	39828	lembar	67790	lembar	6638	lembar		6638	lembar		100.0%		6638	lembar	13276	lembar	33%
		Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	19	jenis	5	jenis	5	jenis		5	jenis		100.0%		19	jenis	19	jenis	100%
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	17	jenis			8	jenis		8	jenis		100.0%		17	jenis	17	jenis	100%
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2	jenis			2	jenis		2	jenis		100.0%		2	jenis	2	jenis	100%
		Piket Harian Kantor	72	bulan	10	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari)	16	kali	2	jenis	4	kali		4	kali		100.0%		4	kali	8	kali	50%
		Sarana kerja yang tersedia	4	jenis											1	jenis	1	jenis	25%
1.3	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran							130,961,012				130,794,044		99.9%					
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4	jenis	12	dokumen	4	jenis		4	jenis		100.0%		4	jenis	4	jenis	100%
		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	28	ASN			27	ASN		27	ASN		100.0%			ASN	27	ASN	96%
		Jasa tenaga bantuan	3	orang			3	orang		3	orang		100.0%		3	orang	3	orang	100%

2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	100%				100%		300,288,500	100%		277,238,795	100%	92.32%				
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor	Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1	unit	1	unit	1	unit	241,038,500	1	unit	239,139,050	100.0%		1	unit	1	unit	100%
		Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	4	unit	4	unit	4	unit		4	unit		100.0%		3	unit	4	unit	100%
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional							59,250,000			38,099,745							
		a. Roda 4	1	unit	1	unit	1	unit		1	unit		100.0%		1	unit	1	unit	100%
		b. Roda 3	2	unit	2	unit	2	unit		2	unit		100.0%		2	unit	2	unit	100%
		c. Roda 2	13	unit	13	unit	13	unit		13	unit		100.0%		13	unit	13	unit	100%
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	100%				100%		37,361,950			31,309,175		83.8%				
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	54	dok	9	dok	9	dok	37,361,950	9	dok	31,309,175	100.0%	83.8%	9	dok	18	dok	33%

		2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	30 laporan	5 laporan	5 laporan		5 laporan		100.0%		5 laporan	10 dok	33%
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83	83.5	70	2.363.811.664	80.61	1,828,530,207	115.2%	77.4%	81	81	98%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	30%	36.43%	20%		29%		145.0%		29%	29%	97%
4.1	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mergangsan					100,206,750		80,255,550		80.1%			
		1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan	24 dok	4 dok	8 buku		8 buku		100.0%		4 dok	12 dok	50%
		2. Pengyuluhan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW	6 kali	278 orang	1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	33%
		3. Evaluasi Pembangunan Kelurahan	3 kelurhn	3 kelurhn	3 kelr		3 kelr		100.0%		3 kelurhn	3 kelurhn	100%
		4. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	72 kali	12 kali	12 kali		8 kali		66.7%		10 kali	18 kali	25%
		5. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar	84 hari	7 hari	14 hari		14 hari		100.0%		14 hari	28 hari	33%
		6. Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kampung	72 kali	7 kali	48 kali		48 kali		100.0%		12 kali	60 kali	83%
		7. Penyuluhan peran dan fungsi Linmas	8 kali	9 kali	1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	25%

		8. Penyuluhan potensi PKL	6 kali	3 kali	1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	33%
		10. Monitoring dan Pembinaan pengurangan risiko bencana	6 kali		1 kali		1 kali		100.0%		4 kali	5 kali	83%
4.2	Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Mergangsan					83,565,414		70,427,248		84.28%			
		1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	72 bulan	11% jenis	5 jenis		5 jenis		100.0%		12 bulan		0%
		2. Pengelolaan Retribusi:											
		a. TPU Sasanalaya	156,000,000	30,695,000	26,000,000		31,835,000		122.4%		26,000,000	57,835,000	37%
		b. Pelayanan perijinan	72 bulan	22,169,800	7,681,500		12 bulan		0.0%		12 bulan	24 bulan	33%
4.3	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman					406,407,000		300,567,622	74.0%	74.0%			
		Pelatihan kelompok masyarakat	55 jenis	12 jenis	13 jenis		12 jenis		92.3%		10 jenis	22 jenis	40%
		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	49 jenis	5 jenis	9 jenis		9 jenis		100.0%		8 jenis	17 jenis	35%
		Gebyar Lansia	6 kali	300 orang	1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	33%
		Gebyar PAUD	7 kali	275	2 kali		2 kali		100.0%		1 kali	3 kali	43%
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	6 kali	0	0 kali		0 kali				1 kali	1 kali	17%

		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	30	kali	7	kali	7	kali		7	kali		100.0%		7	kali	14	kali	47%
		Pentas seni kelurahan	2	kali	1	kali	2	kali		1	kali		50.0%						0%
		Pembinaan Jam Belajar masyarakat	6	kali			1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
4.3	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan								327,687,000			278,609,250	85.0%	85.0%					
		Pelatihan kelompok masyarakat	52	jenis	11	jenis	14	jenis		14	jenis		100.0%		10	jenis	24	jenis	46%
		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	60	jenis	4	jenis	9	jenis		5	jenis		55.6%		10	jenis	15	jenis	25%
		Gebyar Lansia	6	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		Gebyar PAUD	6	kali	1	kali	1	kali		2	kali		200.0%		1	kali	3	kali	50%
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	6	kali			0	kali		0	kali				1	kali	1	kali	17%
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	30	kali	19	kali	7	kali		4	kali		57.1%		7	kali	11	kali	37%
		Pentas seni kelurahan	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%				1		100%
		Pembinaan Jam Belajar masyarakat	6	kali			1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
4.3	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan								454,061,000			341,272,900	75.2%	75.2%					
		Pelatihan kelompok masyarakat	52	jenis	6	jenis	12	jenis		9	jenis		75.0%		8	jenis	17	jenis	33%

		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	60	jenis	12	jenis	17	jenis		17	jenis		100.0%		11	jenis	28	jenis	47%
		Gebyar Lansia	6	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		Gebyar PAUD	6	kali	1	kali	2	kali		2	kali		100.0%		1	kali	3	kali	50%
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	6	kali	1	kali	0	kali		0	kali				1	kali	1	kali	17%
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	30	kali	7	kali	7	kali		5	kali		71.4%		7	kali	12	kali	40%
		Pentas seni kelurahan	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%			kali	1	kali	100%
		Pembinaan Jam Belajar masyarakat	6	kali			1	kali		1	kali		100.0%						0%
4.4	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan								251,560,000			227,240,200		90.3%					
		Forum TKPK Kecamatan	3	kel	3	kel	3	kel		3	kel		100.0%		3	kel	3	kel	100%
		Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan	6	kali	3	kelurhn		kali			kali				1	kali	1	kali	17%
		Pelatihan / sosialissi / penyuluhan pendidik PAUD	11	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%		2	kali	3	kali	27%
		Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	6	kelrhn	1	kelurhn	1	kel		1	kel		100.0%		1	kelrhn	2	kelrhn	33%

		Penyuluhan kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	25	kali												0		0%
		Operasional TP PKK Kecamatan dan kelurahan	4	TP PKK	4	TP PKK	4	TP PKK		4	TP PKK		100.0%		4	TP PKK	4	TP PKK	100%
		Penyuluhan kelembagaan TP PKK Kecamatan	24	kali											5	kali	5	kali	21%
		Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	3	kel				kel			kel				3	kel	3	kel	100%
		Pembinaan mental spiritual generasi muda	6	kali			1	kali		1	kali		100.0%		2	kali	3	kali	50%
		Forum organisasi kemasy tingkat kecamatan	30	kali			5	kali		5	kali		100.0%		5	kali	10	kali	33%
		Workshop pengembangan kesenian	1	kali				kali			kali				1	kali	1	kali	100%
		HKG PKK KB Kes	4	kali													0		0%
		Pentas Seni Kecamatan	5	kali											1	kali	1	kali	20%
		Pembinaan Olah Raga dan Kesenian	10	kali				kali		2	kali				2	kali	4	kali	40%
4.5	Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan								509,878,500			474,358,936		93.0%				
		1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	24	dok	4	dok	4	dok		4	dok		100.0%		4	dok	8	dok	33%
		2. Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	6	dok			1	dok		1	dok		100.0%		1	dok	2	dok	33%

		3. Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan	24	dok	4	dok	4	dok		4	dok		100.0%		4	dok	8	dok	33%
		4. Pemeliharaan Jalan	4200	m²	2754.19	m²	1600	m²		1668.4	m²				785	m²	2453.4	m²	58%
		5. Pemeliharaan PJU	3	kelur	3	kelur	3	kelur		3	kelur				3	kelurh	3	kelurh	100%
		7. Pemeliharaan Makam	1	makam	1	makam	1	makam		1	makam		100.0%		1	makam	1	makam	100%
		10.Penyuluhan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM	6	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		11.Pelatihan UMK	13	jenis			3	kalil		3	kalil		100.0%		2	jenis	5	jenis	38%
		12.Pelatihan Karang Taruna	5	kali				kali			kali				1	kali	1	kali	20%
		13.Pelatihan ketrampilan PKH	5	kali			1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	40%
		14.Pelatihan ekonomi PKK	10	kali			2	kali		2	kali		100.0%		2	jenis	4	jenis	40%

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan
KotaYogyakarta

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan		365	340	345	350	355	360	365	381	345	350	355	Realisasi Tahun 2018 pada saat Renja ini disusun belum dapat dilakukan penghitungan karena belum diperoleh data
2.	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		80	70	71	72	73	74	75	80,61	71	72	73	
4.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat		31%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	29%	21%	22%	23%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman dan dan Kelurahan Wirogunan. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Brontokusuman dan Kantor Lurah Wirogunan. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan maasuk dimana menjadi ramah lansia dan difable di Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Wirogunan. Selain itu juga perbaikan tempat parkir bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Wirogunan. Perbaikan ruang pertemuan di Kantor Lurah Brontokusuman agar pertemuan warga masyarakat menjadi nyaman serta perbaikan kanopi untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia

TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Keparakan sampai tahun 2017 ini belum terwujud padahal sudah memiliki lokasi atau tanah hasil pengadaan tahun 2014. Demikian juga untuk Kelurahan Brontokusuman penyediaan lahan untuk pembangunan gedung kantor tahun 2017 sampai pada selesainya proses pengadaan sehingga menunggu kebijakan pembangunan gedungnya.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Brontokusuman, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wirogunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keparakan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain

berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mergangsan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan

tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

2.4. Eview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan awal RKPD pagu anggaran indikatif untuk SKPD Kecamatan Mergangsan tahun 2019 adalah Rp 2.962.220.870,- (Dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Pagu indikatif tersebut sudah termasuk pagu anggaran untuk Program internal dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan masih diuraikan dalam beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan
2. Pelayanan, informasi dan pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan
3. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan

Setelah melalui diskusi pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 untuk kegiatan tahun 2019 telah dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan maka tersusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Mergangsan.

Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

SKPD : Kecamatan Mergangsan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,962,220,870					**2,962,220,870**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**MG**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**MG**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**710,404,359**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				114,526,500	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				521,915,418	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				73,962,441	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**MG**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**MG**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%	143,365,002	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				81,601,692	

2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				61,763,310	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**MG**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**MG**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**19,439,266**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD				19,439,266	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**MG**	**Tingkat Swadaya Masyarakat**	71	1.946.811.000	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**MG**	**Tingkat Swadaya Masyarakat**	71	2,089,012,243	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	22%				**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	22%		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan					Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan				112,622,990	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan					Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan				66,081,593	

4.3	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman					Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman				279,439,000	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan					Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan				241,620,000	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan					Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan				327,600,000	
4.6	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan					Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan				236,089,200	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan					Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan				**825,559,460**	
					2,962,220,870					**2,962,220,870**	

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan koridor terhadap adanya Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian urusan kepada camat. Batasan tersebut yang harus menjadi pedoman dalam perencanaan.

Proses penjaringan berbagai rencana kegiatan dilakukan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi sosial yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain dari proses Musrenbang, usulan berbagai kegiatan tahun 2019 juga memperhatikan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Musrenbang dilakukan pada awal tahun 2018 dengan hasil sesuai dengan tabel 2.4 sebagai berikut:

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

KOTA YOGYAKARTA

Kecamatan : Mergangsan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		CATATAN
A.	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**Kec. Mergangsan**	**1. Tingkat swadaya masyarakat**	**22%**		
			2. Nilai Survey Kepuasan masyarakat	**71**		
	1) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan					
		Kec. Mergangsan	Penyuluhan kelembagaan RT RW	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Penyuluhan peran dan fungsi Linmas	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Penyuluhan potensi PKL	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Monitoring dan Pembinaan Pengurangan risiko Bencana	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	2) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan					
		Kec. Mergangsan	Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik Paud	2 kali	Usulan	Akan

					Musrenbang	dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	1 kelurahan	Kegiatan Rutin	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Operasional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan kelurhan	1 ke 3 kel	Kegiatan Rutin	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan	4 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	3 Kleurahan		Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Pembinaan mental spiritual generasi muda	1 kali	**Pokir DPRD**	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Pembinaan Olah Raga dan kesenian	2 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kec. Mergangsan	Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	3) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman					
		Kel. Brontokusuman	Pelatihan Kelompok Masyarakat	8 jenis		
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Teknik Bercerita dan cerita gambar	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Kampung Sayur	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan MC Pranotocoro	25 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Sablon	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Tas anyaman dari tali kur	30 orang	Usulan	Akan

					Musrenbang	dilaksanakan
			Pelatihan Batik Sibori	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan BOGA	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Manajemen Kepemudaan	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Brontokusuman	Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	8 jenis		
			Sosialisasi PATBM	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penyuluhan administrasi kegiatan JBM dan Hibah RT/RW	110 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penyuluhan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penyuluhan peningkatan Kader BKB	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penyuluhan peningkatan kapasitas GSI	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sosialisasi Kampung Budaya	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penyuluhan Adminsitrasi JBM	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penyuluhan UKM	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pembinaan Administrasi PKK RT RW	23 RW, 84 RT	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Brontokusuman	Gebyar lansia	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Brontokusuman	Gebyar Paud	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Brontokusuman	Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kelurahan	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

	4) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan					
		Kel. Keparakan	Pelatihan Kelompok Masyarakat	8 jenis		
			Pelatihan Batik Jumputan	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan On Line Shop	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Akupresur	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan kader pencegahan Bahaya Napza	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan MC	20 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Tata Busana	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Administrasi PKK	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Kader Posyandu	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Keparakan	Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	8 jenis		
			Sosialisasi & Pembentukan MK RW	100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sarasehan Kelompok Sadar Gender RW	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sarasehan Kader Bagi Kader BKS, BKL, BKB, BKR	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sarasehan Kader Pendidik PAUD	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Kegiatan Jumat Bersih	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

			Sarasehan Kader IMP	80 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sarasehan Kader Posyandu	80 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sarasehn Kader PHBS dan Kesling	80 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sosialisasi dan Pembuatan Kantong Kasih Sayang BKR	20 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Lomba Cerdas Cermat Kader KB	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Keparakan	Gebyar lansia	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Keparakan	Gebyar Paud	1 kelurahan	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Keparakan	Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 Kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	5) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan					
		Kel. Wirogunan	Pelatihan Kelompok Masyarakat	8 jenis		
			Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Pembuatan Sandal Hotel	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Batik Siboli	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Kader IMP	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pembinaan Pola Asuh Anak	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Daur Ulang Sampah	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan APE Tradisional	50 orang	Usulan	Akan

					Musrenbang	dilaksanakan
			Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan UKGMD	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Acupresure dan TOGA	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Kecantikan	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pelatihan Kamtibmas	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
					Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Wirogunan	Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	8 jenis		
			Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Stimulan PKK RW dan RT	24 RW 76 RT	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sarasehan Kader PKK	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penyuluhan KDRT	75 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sapaan Anak Kos	100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kelurahan	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sosialisasi Tentang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Sosialisasi Kawasan Bebas Asap Rokok	100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Wirogunan	Gebyar lansia	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

		Kel. Wirogunan	Gebyar Paud	1 kelurahan	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Kel. Wirogunan	Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	6) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan					
		KP, BR ,WG, Kec. MG	Pemeliharaah PJU		Usulan Musrenbanng	Akan dilaksanakan
			Pemeliharaan Jalan Kelurahan Keparakan			
		RW 7/RW 8	Conblok / pavingblok	450 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 9	Conblok / pavingblok	60 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 10	Conblok / pavingblok	350 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 10/RW 11	Conblok / pavingblok	300 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 7, 8, 9 Gg Kepel	Gapura kampung	2 unit	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pemeliharaan Jalan Kelurahan Brontokusuman			
		RW 4 RT 12	Conblok / pavingblok	200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 5 RT 14	Conblok / pavingblok	200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 6	Conblok / pavingblok	50 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 8	Conblok / pavingblok	200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 10	Conblok / pavingblok	80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

		RW 11 RT 41	Conblok / pavingblok	100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 12 RT 46	Conblok / pavingblok	120 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 13	Conblok / pavingblok	80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 15 RT 56	Conblok / pavingblok	100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 16 RT 60	Conblok / pavingblok	80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 17 RT 63	Conblok / pavingblok	200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 18 RT 64	Conblok / pavingblok	80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		Rw 07 RW 22 RT 76	SPAH	10 UNIT	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
			Pemeliharaan Jalan Kelurahan Wirogunan			
		RW 01	Conblok / pavingblok	60 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 11	Conblok / pavingblok	100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 14	Conblok / pavingblok	60 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 16	Conblok / pavingblok	30 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 18	Conblok / pavingblok	50 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 23	Conblok / pavingblok	100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
		RW 17	Conblok / pavingblok	90 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Publik

Dalam Rencana kerja OPD yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya. Program yang direncanakan harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*publicreform)* yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum,

lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

Pengarusutamaan Gender

Diakuinya Strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan pada tataran Nasional maupun Daerah sebagai kebutuhan pembangunan nasional akan mengakar ke dalam kebijakan perencanaan pada tataran OPD. Hal tersebut diperkuat dengan telah disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut Branding Kecamatan Mergangsan adalah Kecamatan Mergangsan Menuju Pembangunan Wilayah Berwawasan Gender, menunjukan keseriusan dalam mengakomodir perencanaan berwawasan gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan mendasarkan pada pelimpahan kewenangan yang dimiliki.

Sasaran gender dalam pembangunan antara lain perempuan, anak-anak, keluarga miskin, Lansia dan defabel menjadi pokok sasaran dan partisipasi dalam pembangunan di Kecamatan Mergangsan. Sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya semestinya memperhatikan dan mengutamakan hal itu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mergangsan

3.2.1. Visi dan Misi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **"Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan".**

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Mergangsan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.**

3.2.2. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mergangsan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan"**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.2.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Mergangsan menetapkan sasaran sebagai berikut: **"Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat".** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan OPD Kecamatan Mergangsan tahun 2019 akan dijelaskan pada Bab IV secara sitematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan tahun 2017-2022.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana uraian Visi dan Misi Kepala Daerah pada bab ini telah diuraikan bahwa Kecamatan Mergangsan dalam program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi ke satu Walikota Yogyakarta yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.** Perumusan program dan kegiatan mengacu pada pelaksanaan misi tersebut.

2) Pengentasan Kemiskinan

Walaupun tidak menjadi indikator utama dalam ketugasan Kecamatan, namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu program dan kegiatan dirumuskan terkait dengan sosial, budaya dan perekonomian.

3) Pelimpahan Kewenangan

Dalam menyusun program dan kegiatan, kecamatan berpedoman pada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat, sehingga Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan manjadi acuan sejak awal perencanaan.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi tema utama dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya kecamatan karena

merupakan perangkat daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Kegiatan

Kecamatan Mergangsan memiliki program sebagai berikut:

a) Program internal ada 3 (tiga), terdiri dari:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Program ini diuraikan menjadi 3 (tiga) kegiatan antara lain Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantordan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD.

b) Program eksternal ada 1 (satu), yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan antara lain Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan, Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan, Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan

2) Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Meregangsan

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Meregangsan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec Meregangsan
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Kelurahan Brontokusuman
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Kelurahan Keparakan
	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Kelurahan Wirogunan
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan

1) Kebutuhan dana pagu indikatif menurut sumbernya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana / Sumber dana
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710,404,358.76 APBD Kota Yk
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143,365,002 APBD Kota Yk
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19,439,266 APBD Kota Yk
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	2,089,012,243 APBD Kota Yk
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	112,622,990 APBD Kota Yk
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	66,081,593.01 APBD Kota Yk
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	279,439,000 APBD Kota Yk
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan	241,620,000 APBD Kota Yk

	Keparakan	
	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	327,600,000 APBD Kota Yk
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	236,089,200 APBD Kota Yk
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	825,559,460 APBD Kota Yk

c. Kesesuaian Program / Kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD

Seluruh Program dan Kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2019 dapat disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA YOGYAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MERGANGSAN

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indiokatif	Sumber Dana		Tagret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	Kec MG		**710,404,359**	APBD Kota Yk			731,716,490
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum koordinasi		70 kali	114,526,500	APBD Kota Yk		70 kali	117,962,295
		Makan minum pegawai		52 orang				52 orang	
		Makan minum tamu		4 kali				4 kali	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia		120 buah	521,915,418	APBD Kota Yk		120 buah	537,572,881
		Materai 3000 yang tersedia		370 buah				370 buah	
		Jasa pembayaran rekening listrik		12 bulan				12 bulan	

		Jasa pembayaran rekening air		12 bulan				12 bulan	
		Jasa pembayaran rekening telphon		12 bulan				12 bulan	
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 jenis				5 jenis	
		Jasa Pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		1 kali				1 kali	
		STNK Roda 4 yang terbayar		1 unit				1 unit	
		STNK Roda 3 yang terbayar		2 unit				2 unit	
		STNK Roda 2 yang terbayar		13 unit				13 unit	
		Bahan dan alat kebersihan yang tersedia		3 jenis				3 jenis	
		jasa kebersihan kantor		12 bulan				12 bulan	
		Jasa perbaika peralatan kerja		12 jenis				12 jenis	
		Jasa pemeliaharaan laptop/komputer		2 jenis				2 jenis	
		Alat tulis kantor yang tersedia		47 jenis				47 jenis	
		jasa percetakan		3 jenis				3 jenis	
		Jasa penggandaan		66.388 lembar				66.388 lembar	
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		19 jenis				19 jenis	
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia		17 jenis				17 jenis	
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		2 jenis				2 jenis	
		Piket harian pengamanan kantor		12 bulan				12 bulan	
		jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair (meja, kursi, almari)		4 kali				4 kali	
		Sarana Kerja yang tersedia		4 jenis				4 jenis	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tenaga bantuan		3 orang	73,962,441	APBD Kota Yk		3 orang	76,181,314
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	Kec MG		**143,365,002**	APBD Kota Yk			147,665,952

2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan bangunan gedung kantor		4 unit	81,601,692	APBD Kota Yk		4 unit	84,049,743
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4		1 unit	61,763,310	APBD Kota Yk		1 unit	63,616,209
		pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3		2 unit				2 unit	
		pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		13 unit				13 unit	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kec MG		**19,439,266**	APBD Kota Yk			20,022,444
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran: Rensrta, Renja, PK, RKA, DPA		9 Dokumen	19,439,266	APBD Kota Yk		9 Dokumen	20,022,444
		Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun		5 jenis laporan				5 jenis laporan	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**Tingkat Swadaya Masyarakat**		22%	**2,089,012,243**	APBD Kota Yk		23%	2,151,682,610
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		72				73	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Pengelolaan Data Monografi Kelurahan/Kecamatan		4 dokumen	112,622,990	APBD Kota Yk		4 dokumen	116,001,680
		Penyuluhan Kelembagaan dan pembinaan RT/RW		1 kali				1 kali	
		Evaluasi Pembangunan Kelurahan		3 Kelurahan				3 Kelurahan	
		Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		10 kali				10 kali	
		Pengamanan Hari Raya/ Hari besar		14 hari				14 hari	
		Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kamling		12 kali				12 kali	

		Penyuluhan peran dan fungsi linmas		1 kali				1 kali	
		Penyuluhan potensi PKL		1 kali				1 kali	
		Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana		1 kali				1 kali	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan		12 bulan	66,081,593.01	APBD Kota Yk		12 bulan	68,064,041
		Retribusi TPU Sasanalaya		26,000,000				26,000,000	
		Pengelolaan retribusi pelayanan perijinan		12 bulan				12 bulan	
4.3	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Pelatihan Kelompok Masyarakat		8 jenis	292.591.000	APBD Kota Yk		8 jenis	301.368.730
		Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat		8 jenis				8 jenis	
		Gebyar lansia		1 kali				1 kali	
		Gebyar Paud		1 kali				1 kali	
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan		4 kali				4 kali	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Pelatihan Kelompok masyarakat		8 jenis	250.356.000	APBD Kota Yk		8 jenis	257.866.680
		Sosialisasi, Penyuluhan , srasehan dan pembinaan masyarakat		8 jenis				8 jenis	
		Gebyar Paud		1 kali				1 kali	
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Gebyar Lansia		1 Kali				1 Kali	
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan		4 kali				4 kali	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Pelatihan kelompok masyarakat		8 jenis	340.560.000	APBD Kota Yk		8 jenis	350.776.800
		Sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat		8 jenis				8 jenis	
		Gebyar Paud		1 kali				1 kali	

		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Gebyar Lansia		1 kali				1 kali	
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan		4 kali				4 kali	
4.6	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Forum TKPK Kecamatan		3 kelurahan	236,089,200	APBD Kota Yk		3 kelurahan	243,171,876
		Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan		2 kali				2 kali	
		Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik Paud		2 kali				2 kali	
		Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan		5 kali				5 kali	
		Operasional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan kelurhan		1 ke 3 kel				1 ke 3 kel	
		Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan		4 kali				4 kali	
		Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)		3 Kleurahan				3 Kleurahan	
		Pembinaan mental spiritual generasi muda		1 kali				1 kali	
		Pembinaan Olah Raga dan kesenian		2 kali				2 kali	
		Forum organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan		5 kali				5 kali	
		Pentas kesenian kecamatan		1 kali				1 kali	
		Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan		1 kali				1 kali	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Musrenbang Kecamatan dan Keluarahn		4 dokumen	825,559,460	APBD Kota Yk		4 dokumen	850,326,244
		Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Profil Kelurahan dan Kecamatan		4 dokumen				4 dokumen	
		Pemeliharaan Jalan		1.500 m²				1.500 m²	

		Pemeliharaan Fasilitas Umum		3 jenis				3 jenis	
		Pemeliharaan PJU		3 kelurahan				3 kelurahan	
		Penyuluhan Kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM		1 kali				1 kali	
		Pelatihan UMK		2 kali				2 kali	
		pelatihan Karang Taruna / Generasi muda		1 kali				1 kali	
		Pelatihan ketrampilan PKH		1 kali				1 kali	
		Pelatihan Ekonomi PKK		2 kali				2 kali	
					2.997.068.869	APBD Kota Yk			3.086.980.932

BAB V
P E N U T U P

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara teknis jika menemui hambatan atau persoalan dengan tidak cukupnya anggaraan yang tersedia maka dilakukan efisiensi dengan mengurangi pengeluaran yang dapat diefisienkan namun tidak mempengaruhi output. Artinya output kegiatan tetap dapat dicapai. Apabila memungkinkan pelaksanaannya disinkronkan dengan proses perubahan anggaran pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap Perangkat Daerah.

Sebagai proses lanjutan dari dokumen ini adalah masing-masing unsur pada Kecamatan Mergangsan dalam hal ini PPTK, menyusun secara detail dan secara teknis Rencana Kerja Anggarannya dengan berpedoman pada Dokumen Renstra, Renja, Bagan Akun, Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa sehingga dapat terwujud rincian anggaran yang akuntabel.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

CAMAT MERGANGSAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN

Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI

NIP 196702061994032007